



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

**KECAMATAN PANCUR
KABUPATEN REMBANG**

Jl.JatirogoNo. 20(0295) 531020,59262

Website:[https ://kecamatan.rembangkab.go.id](https://kecamatan.rembangkab.go.id)

kecamatan@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pancur Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Pancur Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Kecamatan Pancur tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 24 Februari 2025

Plt. CAMAT PANCUR



KARTIMAN, SH. MH

Penata Tk. I

NIP. 19761225 201001 1 017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Penurunan Stunting diukur dengan indikator :

Presentase Penurunan Stunting dengan bantuan secara berkala memenuhi gizi

(Jumlah Penanganan Stunting/Jumlah Populasi x 100%).

Realisasi indikator Persentase Penurunan Stunting tahun 2024 sebesar 12,95% dari target 3,68% dengan capaian 351,90%.

Capaian indikator ini didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya peran serta perempuan PKK Desa dalam Memantau anak-Anak yang berdampak kena stunting” diukur dengan indikator :

Capaian Kabupaten Layak Anak

Realisasi indikator Capaian Kabupaten Layak Anak sejumlah 751,69 dari target 800 Angka dengan capaian 93,96%.

Capaian indikator ini didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

3. Capaian sasaran strategis 3 “Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas” diukur dengan indikator :

- a. CPR (Jumlah peserta Keluarga Sehat dibagi Jumlah Pasangan Keluarga Sehat di kali 100%)

Realisasi indikator CPR sebesar 74,04% dari target 66,66% dengan capaian 111,08%.

Capaian indikator ini didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Pancur Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Rembang ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya ketersediaan sumber daya manusia professional dibidang Stanting untuk gizi anak
2. Perlunya pengembangan sarana prasarana kesejahteraan keluarga agar bias makan makanan empat sehat lima sempurna .
3. Perlunya jaringan system informasi public terkait gizi untuk merawat anak
4. Perlunya desa mempunyai kelembagaan yang menangani khusus pemantauan anak kuang gizi
5. Perlunya penguatan kelembagaan dan jejaring kesehatan anak;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja	11
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	12
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	12
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.....	13
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	13
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	14
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	15
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	16
3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	17
3.2 Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	3
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	6
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024	6
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah	7
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	8
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah (bila ada)	9
Tabel 2.7	Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	9
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	12
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	12
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	13
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	13
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	14
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	15
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	16
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas XYZ diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Pancur Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kecamatan Pancur :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Pancur mempunyai tugas :

Sebagai Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Pancur mempunyai fungsi :

1. CAMAT

a. Tugas

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum ;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau Kelurahan ;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan ,
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatusahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
4. Pengkoordinasian pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan.
5. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan.
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas :

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan ;
- b. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas :

melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- e. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan;

b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

d. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;

e. fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;

f. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;

g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;

h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

i. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

j. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas :

melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

d. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

e. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

9. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas :

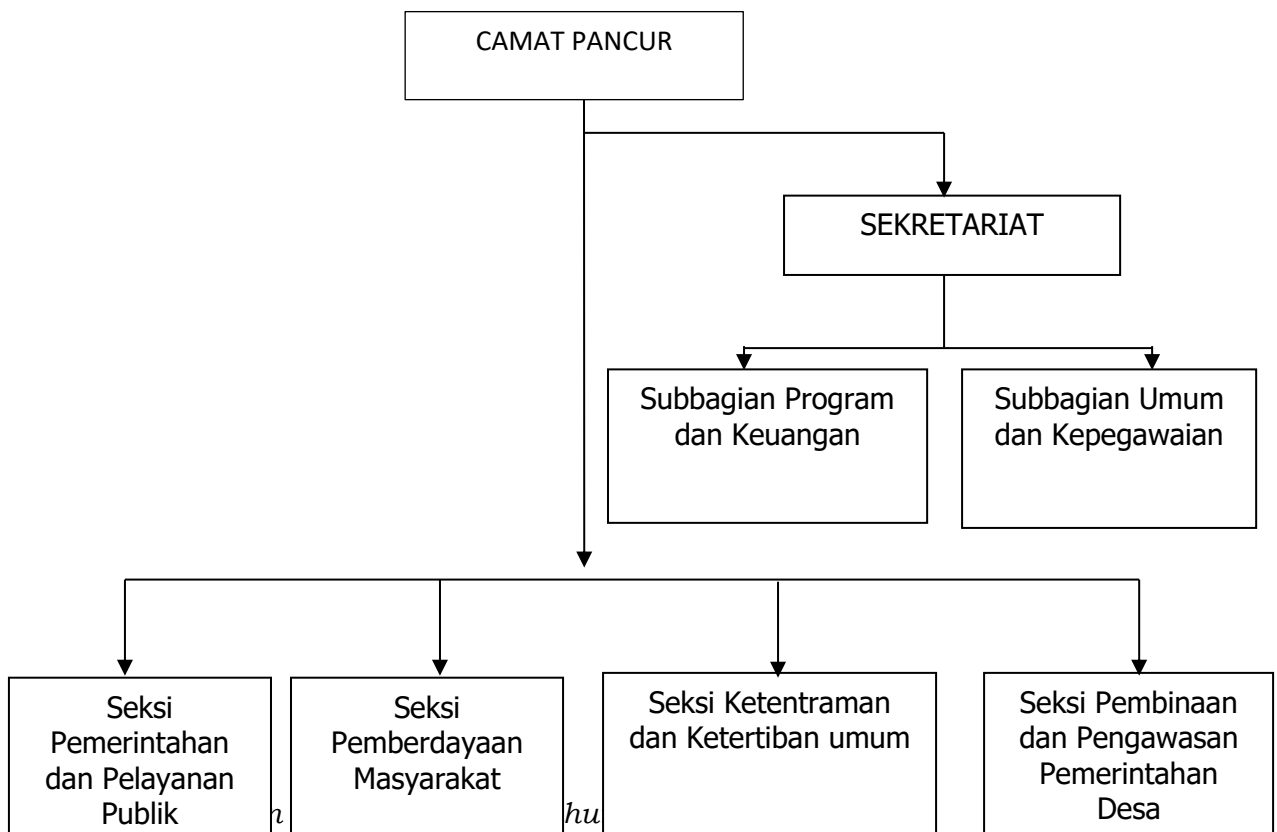
melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

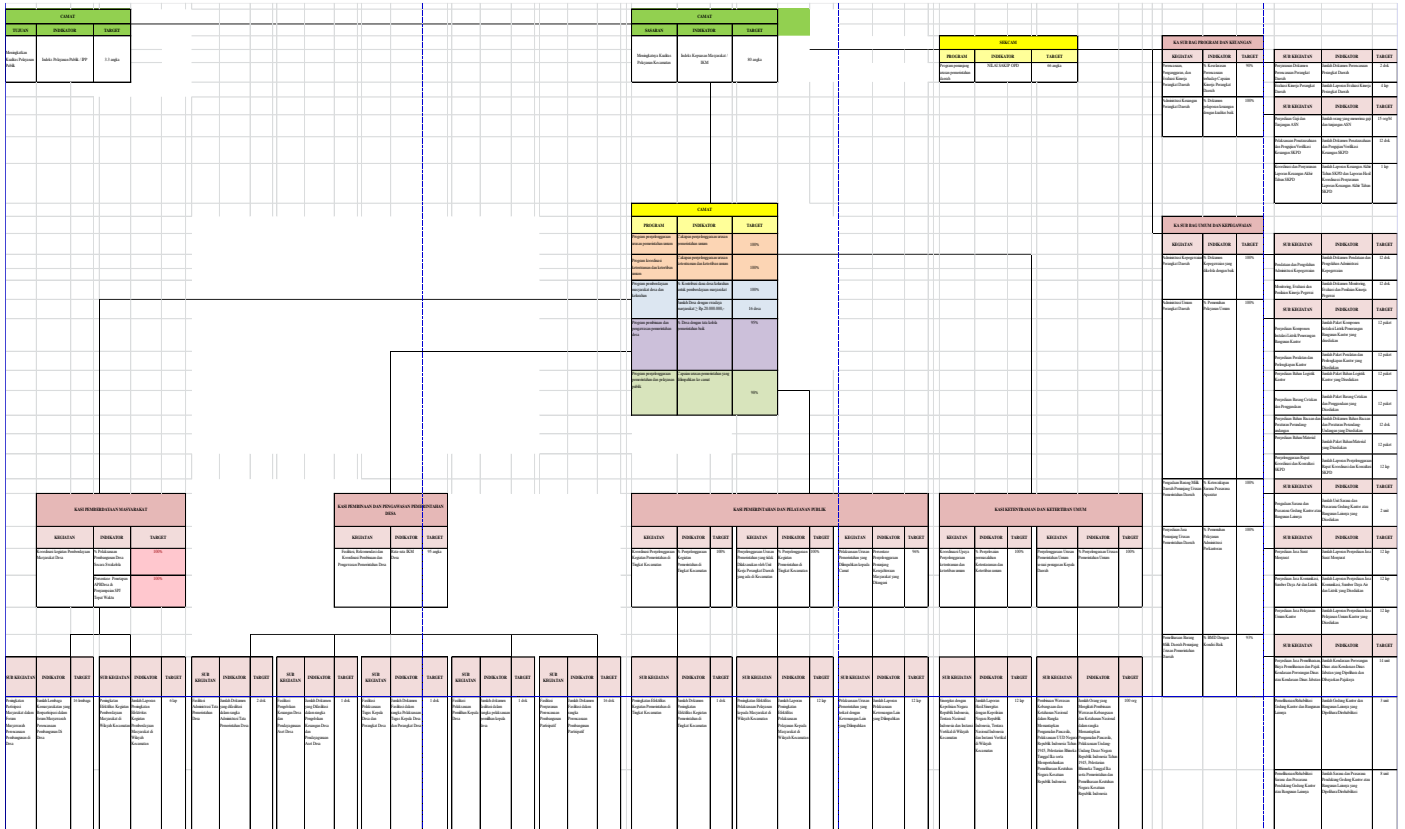
- a. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- f. fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

- g. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama fas, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- i. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- k. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Pancur. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Pancur.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pancur





1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Pancur. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Pancur :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp1.997.728.185,-
APBD	Tahun 2024	Rp2.200.487.553,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)	-	Rp0,-

Sumber : DPA SKPD Kecamatan Pancur

Tabel SDM Perangkat Daerah (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
3	SMA Sederajat	7	0	0	1	8
4	D3	0	0	0	0	0
5	S1	6	2	0	1	9
6	S2	2	0	0	0	2
7	S3	0	0	0	0	0
	JUMLAH	16	2	1	2	21

Tabel SDM Perangkat Daerah (Berdasarkan Golongan)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	5	0	5
3	Golongan III	11	2	13
4	Golongan IV	0	0	0
	JUMLAH	16	2	18

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusa	
1	2	3	4	5	6
1	Alat Berat/Genset	unit	1	1	2
2	Alat Angkutan/Kendaraan roda 4	unit	2	0	2
3	Alat Angkutan/Kendaraan roda 2	unit	13	1	14
4	Alat Pertanian	unit	5	0	5
5	Mesin Ketik	unit	0	0	0
6	Almari & Rak Kayu	unit	8	0	8
7	Papan Nama Instansi	unit	4	0	4
8	Mebelair	buah	213	15	213
9	AC	unit	1	6	7
10	Kipas Angin	unit	3	0	3
11	Alat Rumah Tangga Lainnya	unit	1	0	1
12	Meja& Kursi Pejabat	buah	75	0	75
13	Peralatan Studio video dan film	unit	14	0	14
14	Komputer & Laptop	unit	14	1	15
15	Printer	unit	6	0	6
16	Bangunan Gedung	unit	5	0	5



**DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KECAMATAN PANCUR
PER APRIL 2024**

NO.	NAMA	NIP.	PANGKAT	JABATAN
			GOL./RUANG	
1	2	3	4	5
1	KARTIMAN,SH	19761225 201001 1 017	III/d	Plt. CAMAT PANCUR
2	KARTIMAN,SH	19761225 201001 1 017	III/d	SEKRETARIS KECAMATAN
3	IDA NUR'ANI	19870115 201001 2 016	III/d	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	JANARKO,SE	19770415 201001 1 004	III/d	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
5	JATMITO,SE	19730429 200701 1 011	III/b	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
6	KUSNO,SH	19670515 199503 1 004	III/d	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	DIAN HERAWATI,SE,MM	19810624 201001 1 014	III/d	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8	ISBANDI, SE	19770517 200701 1 010	III/b	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
9	MOHAMMAD NURHADI	19740201 199803 1 004	III/b	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
10	MUJAROPAH	19820511 200901 2 003	II/d	PENGELOLA KEUANGAN
11	SUPARMAN	19820713 200901 1 008	II/d	PENGELOLA GAJI
12	KASWADI	19670521 199210 1 001	III/b	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMDES
13	SUSANTO	19690515 198903 1 004	II/d	PENGADMINISTRASIAN PEMERINTAHAN
14	JANARKO	19720519 200906 1 002	II/d	PENGELOLA KEPEGAWAIAN
15	PUJIANTO	19680210 200701 1 040	III/a	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
16	PURNOMO	19761215 201001 1 016	II/d	PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT
17	LASRIN	19681121 200701 1 020	II/b	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
18	MUNAJI	19680515 200906 1 001	II/d	MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Pancur, 01 JANUARI 2025

Plt. CAMAT PANCUR

KARTIMAN, S.H., M.H.

NIP. 19761225 201001 1 017

NAMA UNIT ORGANISASI

: KECAMATAN PANCUR

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Jabatan (JPT/Ess)	Jenjang Ahli atau Terampil	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarka	Proyeksi										Jumlah Non ASN	
							Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan						
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Seluruhnya						17	40	0	3	2	1	3	0	9	6	1	2	
1	CAMAT	S-1	JFT		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
2	SEKRETARIS CAMAT	S-2	Ess III		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	S-1	Ess IV		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	PENATA KEUANGAN	S-1	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
6	PENGELOLA KEUANGAN	SLTA	JFU		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PENGELOLA GAJI	SLTA	JFU		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-2	Ess. IV		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ANALIS KELEMBAGAAN	S-1	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	SLTA	JFU		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
11	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	S-1/SLTA	JFU		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	PENGADMINISTRASI UMUM	T ADI/D2/D	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
13	PRAMU BAKTI	SLTA	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
14	PETUGAS KEAMANAN	SLTA	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
15	PENGEMUDI	SLTA	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
16	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	S-1	Ess. IV		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	ANALIS LAYANAN UMUM	S-1	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
18	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	SLTA	JFU		2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
19	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SLTA	JFU		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	S-1	Ess. IV		0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
21	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	S-1	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
22	PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT	SLTA	JFU		2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
23	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	SLTA	Ess. IV		1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
24	PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	S-1	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELEMBAGAAN	SLTA	JFU		1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
26	JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA TERAMPIL	T ADI/D2/D	JF		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PEMULA	3 Manajem	JF		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	S-1	Ess. IV		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	S-1	JFU		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
30	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	SLTA	JFU		1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	

CAMAT PANCUR

 S.H. ISNO, S.Sos
 Pembina
 NIP 19660315 198603 1 004

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pancur ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. SE Sekda tentang pedoman penyusunan dokumen LKJIP

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancur Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2 Prestasi yang diraih
- 3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Kecamatan Pancur adalah Menyejahterakan Masyarakat di kecamatan Pancur Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pancur:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.2	Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dapat menjangkau seluruh penduduk	1.1.2.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Adminduk	Prosentase kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (rata-rata dari 2 program)	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5

Sumber : Renstra Kecamatan Pancur Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1.1.1.1	Nilai SAKIP	Angka	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan	Nilai Indeks : Σ (Nilai Aspek x Bobot Aspek)	Olahan OPD
1.1.1	Meningkatnya Kualitas	1.1.1.1	Indek Kepuasan	Angka	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan	IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur: Total	Laporan SKM Kecamatan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Pelayanan Publik		Masyarakat		Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	unsur yang terisi x Nilai Penimbang	Sumber Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancur Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pancur

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.2	Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dapat menjangkau seluruh penduduk	1.1.2.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Adminduk	Prosentase kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (rata-rata dari 2 program)	prosentase	3,3

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pancur tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Kecamatan Pancur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.	Nilai SAKIP	72
1.1.1	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	3.3

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Pancur.

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Pancur Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Pancur	72 Angka
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat	100%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bln
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bln
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bln
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Bln
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	16 Unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi	100%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bln
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bln
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondidi Baik	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Gedung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	1 Dok

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Dok
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	4 Desa
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan	1 Paket

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pihak Swasta	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	1 Paket
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Paket
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 Paket
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	100 Orang

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-Rata IKM Desa	23
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Desa

Sumber : DPA SKPD Kecamatan Pancur Tahun Anggaran 2024

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.6
Belanja Daerah

No	Akun	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.897.669.553,00	1.773.906.228,00	93,48%	1.812.981.924,00
	Belanja Barang	302.818.000,00	249.554.141.	82,44%	184.746.261,00
	Belanja Modal	0,00	0,00	0%	0,00
	Jumlah	2.200.487.553,00	2.023.560.369,00	91,96%	1.997.728.185,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp2.023.560.369,00 atau 91,96% dari anggarannya sebesar Rp2.200.487.553,00 meningkat sebesar Rp25.832.184,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.997.728.185,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pancur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Pancur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Pancur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancur tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3	3,3	3,3	100	Kec.Pancur
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,74	88,74	102	Kec.Pancur

Sumber : Kecamatan Pancur

Uraian penjelasan tabel :

Indek Pelayanan Publik Memenuhi Target menjadi 100 % dan Indeks Kepuasan Masyarakat Melebihi Target menjadi 102 %

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	Na	3,1	3,2	3,3	3,3	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Na	85	86	87	88,74	102

Sumber :

Uraian penjelasan tabel :

Dari Uraian Di atas IKM dan IPP Mengalami Kenaikan 102% dan 100%

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	72	72	100
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.3	3.3	100

Sumber : Kecamatan Pancur

Uraian penjelasan tabel :

Capaian Sasaran Strategis Menunjukkan Peningkatan yang signifikan

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/ provinsi/daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah sekitar	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3	3,3	100
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,74	102
1.1.2					

Sumber : Kecamatan Pancur

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3	3,3	100	Ada Peningkatan	Meningkatkan Pelayanan Paten
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,74	102	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Atas Pengurusan Dokumen Keluarga (KK,KTP dsb)	Melayani dengan penuh ketulusan dan kesabaran

Sumber : Kecamatan Pancur

Uraian penjelasan tabel :

Berhasilnya penerapan pelayanan PATEN yang di terapkan di lingkungan Kecamatan Pancur

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3,3	3,3	100	2.200.487.553	2.023.560.369	91,96	
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	87	88,74	102	2.200.487.553	2.023.560.369	91,96	

Sumber : Kecamatan Pancur

Uraian penjelasan tabel:

Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan Pagu Rp.2.200 487 553,- dan Realisasi Rp.2.023.560.369,- atau 91,96%

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	72	72	100	2,009,691,913	1,862,897,669	92.70	
	Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86	86	100	2,824,000	-	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	1,409,800		-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100	1,414,200		-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	1,900,084,153	1,774,116,228	93.37	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20	18.00	90	1,869,019,553	1,749,206,228	93.59	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1.00	100	28,650,000	24,610,000	85.90	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	12.00	100	2,414,600	300,000	12.42	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	3,623,000	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100	3,623,000		-	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1		-		#DIV/0!	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	10,389,760	5,926,800	57.04	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	0	-	1,667,600		-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	0	-	320,960		-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	0	-	2,070,000		-	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.0 0	1.00	100	1,206,000	801,800	66.48	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	0	-	-		#DIV/0 !	
	Penyediaan Bahan/Materi al	1.0 0	1.00	100	5,125,200	5,125,000	100.00	
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	-	-			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 0	100	100		-		
	Pengadaan Mebel	16	0	-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	0	-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	80,912,500	75,990,141	93.92	
	Penyediaan Jasa Surat	1	1		200,000	-	-	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Menyurat							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12.00	100	14,900,000	13,852,231	92.97	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12.00	100	65,812,500	62,137,910	94.42	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	11,858,500	6,864,500	57.89	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16	16.00	100	11,858,500	6,864,500	57.89	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	0	-	-	-		
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	0	-	-	-		
	PROGRAM	10	100.0					

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0.00	0	100	73,701,739	63,749,900	86.50	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100.00	100.00%	66,000,000	63,749,900	96.59	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1.00	100.00%	66,000,000	63,749,900	96.59	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100		3,209,539	-	-	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	100	3,209,539		-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	100	100		4,492,200	-	-	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Camat							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	0	-	4,492,200		-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100	59,117,000	46,894,800	79.33	
		6	6	100				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.0 0	100.0 0	10,000	59,117,000	46,894,800	79.33	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.0 0	3.00	100	21,878,400	14,180,800	64.82	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.0 0	1.00	100	37,238,600	32,714,000	87.85	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100	100	100	47,566,600	46,785,000	98.36	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	UMUM							
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100		47,566,600	46,785,000	98.36	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	12.00	100	47,566,600	46,785,000	98.36	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100	4,536,301	1,750,000	38.58	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100		4,536,301	1,750,000	38.58	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka	3.00	3.00	100	4,536,301	1,750,000	38.58	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100	5,874,000	2,000,000	34.05	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90	80	100	5,874,000	2,000,000	34.05	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0.50	0,50	100	5,874,000	2,000,000	34.05	

Sumber : Kecamatan Pancur

Uraian penjelasan tabel:

Dari Tabel diatas menjelaskan secara rinci pagu dan realisasi berisikan Program ,Kegiatan dan Sub kegiatan dengan anggaran dan realisasinya serta prosen tase capaian realisasi terkendala dengan anggaran daerah yang minim tidak bias mendanai semua kegiatan pada tahun 2024

3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IP P	3,3					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,74					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Pancur	92.70	Menunjang	Berhasil
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-		
				Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen			

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaa n Perangkat Daerah	-		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	93.37	Menu- njang	Ber- has- il
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93.59		
				Pelaksanaan Penatausaha- an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah- aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	85.90		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan	12.42		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Akhir Tahun SKPD			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaia n yang dikelola dengan baik	-		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administra si Kepegawaia n	-		
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	#DIV/0 !		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuha n pelayanan umum	57.04	Menu- njang	Ber- has il
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	66.48		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	#DIV/0 !		
				Penyediaan Bahan/Mate- rial	Jumlah Paket Bahan/Mat- erial yang Disediakan	100.00		
				Penyelenggar- aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelengg- araan Rapat Koordinasi	#DIV/0 !		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				SKPD	dan Konsultasi SKPD			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukup- an Sarana Prasarana Aparatur	!		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah- an Daerah	% Pemenuha- an Pelayanan Administra- si Perkantora- n	93.92	Menu- njang	Ber- has- il
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas- i, Sumber Daya Air dan Listrik	92.97		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					yang Disediakan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	94.42		
				Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	% BDM Dengan Kondidi Baik	57.89	Menu- njang	Ber- has- il
				Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57.89		
				Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
				Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/			

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Direhabilitasi			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	86.50	Menun- jang	Ber- has- il
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.59		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.59		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	-		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	-		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		
				PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberday aan masyarkat	79.33	Menu- njang	Ber- has- il
					Jumlah desa			

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	79.33		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	64.82		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87.85		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentrama	98.36	Menu- jang	Ber- has- il

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				KETERTIBA N UMUM	n dan Ketertiban Umum			
				Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaia n permasalah an ketentrama n dan ketertiban umum	98.36		
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	98.36		
				PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	Cakupan Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum	38.58	Menu njang	Ber has il
				Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaa n	38.58		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38.58		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	34.05	Menu- njang	Ber- has- il

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menun- jang/ Tidak Menun- jang	Anali- sis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-Rata IKM Desa	34.05		
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administra- si Tata Pemerintah an Desa	34.05		

Sumber : Kecamatan Pancur

Uraian penjelasan tabel:

Dengan Isi Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum semua terkafer anggaran di karenakan anggaran daerah tidak mencukupi

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.009.691.913,-	1.862.987.669,-	92,70
	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.824.000	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.409.800	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.414.200	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.900.084.153,-	1.774.206.228,-	93,38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.869.019.553,-	1.749.296.228,-	93,59
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.650.000,-	24.610.000,-	85,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.414.000	300.000	12,42
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.623.000	0	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.623.000	0	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	0	0	0

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pegawai			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.389.760,-	5.926.800,-	57,04
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.667.600,-	0	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	320.960,-	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.070.000,-	0	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.206.000,-	801.800,-	66,48
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	0	0	0
	Penyediaan Bahan/Material	5.125.200,-	5.125.200,-	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
	Pengadaan Mebel	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.912.500	75.990.141,-	93,92
	Penyediaan Jasa	200.000	0	0

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.900.000,-	13.852.231,-	92,97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.812.500	62.137.910,-	94,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.858.500	6.864.500	57,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.858.500	6.864.500	57,89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.701.739,-	63.749.900,-	86,50
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	66.000.000	63.749.900	96,59
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	66.000.000	63.749.900	96,59
	Penyelenggaraan	3.209.539,-	0	0

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.209.539,-	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.492.200,-	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.492.200,-	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.117.000,-	46.894.800,-	79,53
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.117.000,-	46.894.800,-	79,53
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.878.400,-	14.180.800,-	64,81
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.238.600,p	32.714.000	87,84

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.566.600	46.785.000	98,36
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.566.600	46.785.000	98,36
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47.566.600	46.785.000	98,36
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.536.301,-	1.750.000,-	38,58
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.536.301,-	1.750.000,-	38,58
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	4.536.301,-	1.750.000,-	38,58

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.874.000,-	2.000.000,-	34,05
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.536.301,-	1.750.000,-	38,58
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.874.000,-	2.000.000,-	34,05

Uraian penjelasan tabel:

Dari Data di atas dari anggaran 2.200.487.553,- tidak bias terserap semua di karenakan tidak ada anggaran untuk mengkafer semua kegiatan Cuma terealisasi 2.023.560.369,- atau 91,96 %

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas XYZ Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas XYZ Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Pancur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pancur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Pancur tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pancur memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang sudah tercapai dengan hasil sangat baik dibuktikan dengan nilai IKM sebesar 88,74.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Pancur adalah Tidak ada sarana yang mendukung kegiatan baik anggaran dan fasilitas yang tersedia
Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Pancur adalah sebagai berikut:
 1. Mengevaluasi perencanaan kinerja dan penganggaran kegiatan.
 2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pancur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pancur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 24 Februari 2025

Pt. CAMAT BANCUR



KARTIMAN,SH.MH

Penata Tk.I

NIP.19761225 201001 1 017

**Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun
2024**

Dilampirkan scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2024 (jika ada)**

Dilampirkan scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Dinas XYZ selama 5 tahun.

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah

Diisi scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari Inspektorat.

Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (jika ada)

Diisi scan Tanggapan/Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2023 (jika ada).

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024 (jika ada)

Diisi scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024.

Lampiran 7 SK IKU PD

Diisi scan SK IKU PD.

Lampiran 8 Profil Indikator Kinerja

Diisi scan Profil Indikator Kinerja.

Lampiran 9 SK Tim Penyusun Dokumen LKjP

Diisi scan SK Tim Penyusun Dokumen LKJP.

**Lampiran 10 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
(LKJP)**

Diisi scan SOP Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.